Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Tonny Laos

by 1rudiantomcs@gmail.com

Submission date: 11-Aug-2022 01:00PM (UTC-0500)
Submission ID: 1881439249
File name: 1.Tesis_Tonny_Laos-turnitin.docx (1.38M)
Word count: 9525
Character count: 80410

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

(Studi Kasus SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2019-2020)

T E S I S

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik

Oleh

TONNY LAOS

NPM: 20550009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan tanda dari adanya era otonomi daerah sehingga tiap daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi, kapasitas, dan daya saing dengan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka beberapa konsep telah ditawarkan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, dan diantara konsep yang paling banyak dibicarakan adalah tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tuntutan yang diberikan oleh masyarakat untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance)* adalah salah satu isu yang paling mengemuka apalagi setelah adanya era reformasi yang telah digaungkan pada tahun 1998. Dan Esensi dari pemerintahan yang baik (*Good Governance)* adalah adanya kualitas dari pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya *Good Governance* memiliki prosip yang bertumpu pada adanya hubungan antara penyelenggara negara (pemerintah), dunia usaha dan masyarakat yang harus selalu dapat bersinergi dalam membangun konsensus. Hubungan atau relasi yang dibangun memiliki tujuan terbangunnya jejaring yang simetris dan inklusif dimana salah satu dari poin penting yang termaktub didalamnya adalah adanya penguatan sinergitas antara ketiga pihak tersebut.

Dalam konteks ini masyarakat adalah pemegang hak, dan penyelenggara pemerintahan sebagai pengemban amanah nya. Dalam peningkatan kapasitas yang dimaksudkan adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan pelayanan secara maksimal, sementara aparatur (penyelenggara pemerintahan) dapat memenuhi kewajiban terhadap hak-hak Masyarakat. Dimana beberap

pendekatan yang dapat dilakukan adalah: (a) memberikan pemahaman tentang hak Masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga dan masyarakat;(b) memastikan masyarakat mendapatkan akses atas informasi tentang kebijakan yang berlaku yang mempengaruhi kehidupannya;(c) memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan;(d) memastikan adanya upaya peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pendidikan dan pelatihan termasuk peningkatan kapasitas berorganisasi dan tersedianya alat/instrumen informasi yang diperlukan (buku,majalah, media komunikasi berbasis teknologi/internet, dan lainnya) yang ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat.[1]

Dalam rangka pengembangan kapasitas hubungan antara masyarakat, penyelenggara negara dan komunitas diperlukan adanya strategi yang sesuai dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: (a) membuat forum dialog yang melibatkan berbagai pihak, (b) melakukan indentifikasi berbagai masalah yang terjadi, melakukan analisis, dan mencari solusi bersama, (c) menyusun kebijakan dan strategi pengembangan dalam bentuk Rencana Pengembangan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.[2]

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan, Kabupaten Pulau Morotai mempunyai luas wilayah 4.301,53km persegi, dimana luas daratan 2.314,960 km persegi dan luas wilayah laut sejauh 4 mil seluas 1.970,93 km persegi. Memiliki panjang garis pantai 311.217 km. Sebanyak 33 pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai dengan rincian sebagai berikut: pulau yang memiliki penghuni berjumlah 7 pulau dan yang tidak memiliki penghuni berjumlah 26 pulau.

Secara administrasi Pulau Morotai sejak tahun 2002 termasuk kedalam Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dengan ibukota propinsi di Tobelo, hal

---

[1] Sri Palupi dkk. Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang
[2] Ibid.

ini berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Utara dengan surat ketetapan nomor: 188.4/06/DPRD/MU/2002 tanggal 15 Februari 2002. Dan berdasarkan UU nomor 56 tahun 2009, tentang pendirian Kabupaten Pulau Morotai, memisahkan diri dari Kabupaten Halmahera menjadi Kabupaten Pulau Morotai yang terbagi menjadi lima kecamatan yaitu: Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Selatan Barat, Morotai Utara dan Morotai Jaya, yang terbagi dalam 64 Desa.[3]

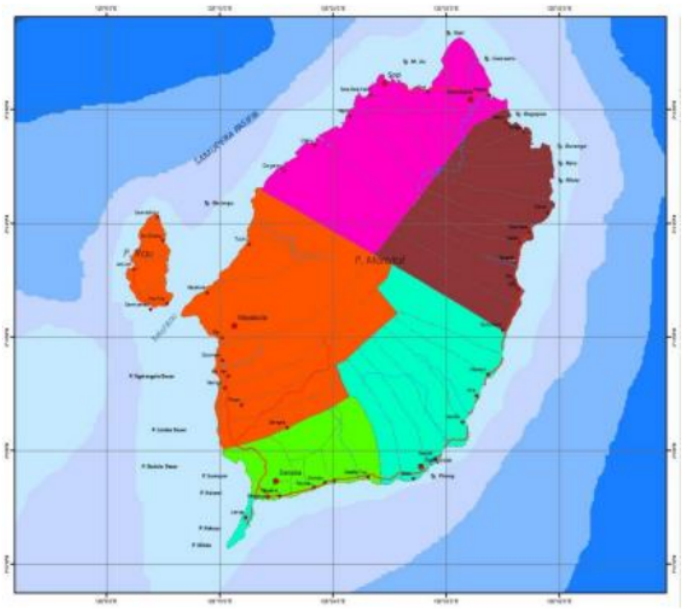

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Pulau Morotai
(Sumber: Cipta karya PU 2020)

Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas perencanaan,

[3]https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_a9214df4c0_BAB%20IVBAB1%20IV%20PROFIL%-20KAB.%20PULAU%20MOROTI.pdf

pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan membuat pertanggungjawaban bidang pendidikan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai yang telah laksanakan. Tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditentukan sebagai sebuah organisasi melalui kerjasama antara seluruh sistem organisasi yang telah dibentuk berdasarkan tugas pokok, dan fungsi sesuai bidangnya, lini, dan staf dan unit pelasana teknis. Oleh sebab itu dukungan dari seluruh komponen sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja unggulan yang telah ditetapkan yaitu "Membangun Sekolah Unggulan".

Untuk dapat mencapai program unggulan yang telah ditetapkan dalam RPJM tersebut pasti membutuhkan kemampuan manajerial dari seorang pemimpin organisasi dalam menggerakan orang lain guna mencapai tujuan organisasi, yang diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai.

Sehingga pada poin ini cukup menarik perhatian untuk di teliti lebih dalam, yaitu bagaimana kebijakan publik dinas pendidikan untuk bisa menjalankan dan mencapai program unggulan yang telah ditetapkan, dengan berbagai atribut kearifan lokal dan berbagai dinamika sosio-kultural yang khas. Pada sisi lain, dinas pendidikan juga diberikan kewenangan sehingga menuntut adanya keterbukaan, kebebasan, partisipasi, dan kolaborasi dalam bentuk manajemen pemerintahan yang baik (*Good Governance)*. Peneliti mengambil studi tentang model relasi yang efektifitas dan efisiensi (tercermin dalam keputusan publik) mengenai penggunaan anggaran tahun 2019 -2020 pada kantor Dinas pendidikan

kabupaten Pulau Morotai. Hipotesis menunjukkan bahwa model tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance* dalam pelayanan publik. Dalam penelitian ini akan membedah variabel *Good Governance* apa saja yang dikembangkan dalam manajemen kepemerintahan dinas pendidikan, serta berbagai tantangan ke depan, terutama dalam menghadapi dinamika demokrasi dan era globalisasi.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelenggaraan *Good Governance* pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program sekolah unggulan di Kabupaten Pulau Morotai?
2 Bagaimana prinsip Efektif dan Efisien yang diterapkan dalam manajemen kepemerintahan apakah telah mendukung *Good Governance* yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai?
3 Apakah model tata kelola Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai yang berbasis *Good Governance* dalam pelayanan publik untuk menjalankan program unggulannya yaitu “menajemen sekolah unggulan”?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di dalam manajemen pemerintahan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi penerapan *Good Governance*.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengamati dan menganalisis Model relasi seperti apa yang harus dibangun antara warga/komunitas dan pemerintah untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan *Good Governance*.
2. Menganalisis berbagai variabel *Good Governance* apa saja yang dikembangkan dalam manajemen kepemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai dalam menghadapi tantangan dinamika demokrasi dan globalisasi di masa depan.
3. Menganalisis dan menggambarkan bagaimana model tata kelola Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai yang berbasis *Good Governance* dalam pelayanan publik untuk menjalankan program "membangun sekolah unggulan".

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaaat Teoritis
   a. Peneliti memperoleh kajian dan materi paradigma yang lebih dalam mengenai *Good Governance*.
   b. Pengembangan terhadap refrensi keilmuan politik terutama menyangkut manajemen pemerintahan berbasis *Good Governance*.
2) Manfaat Praktis
   a. Sinkronisasi teori-teori politik terutama terkait manajemen pemerintahan berbasis *Good Governance* dengan praktik tata kelola pemerintahan Dinas pendidikan pemerintah daerah kabupaten pulau Morotai.

b. Sebagai referensi keilmuan politik terutama menyangkut manajemen pemerintahan berbasis *Good Governance* bagi masyarakat luas
c. Memahami model relasi yang dibangun antara warga/komunitas dengan pemerintah di dinas pendidikan Kabupaten Morotai dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
d. Sebagai referensi pengetahuan tentang penerapan model efektif dan efisien yang mendukung *Good Governance* yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Morotai.
e. Sebagai referensi bagaimana model tata kelola Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai yang berbasis *Good Governance* dalam pelayanan publik untuk menjalankan program unggulannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul dan Nama Penelitian, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan/Persamaan dengan Penelitian yang di lakukan
1	Penelitian dengan Judul "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di dinas Pendidikan Kota Madiun" Oleh Alif Ma'ruf, Harmanto Universitas Negeri Surabaya tahun 2020	Bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dinas pendidikan kota Madiun untuk mencari dan memahami strategi yang diterapkan dalam terwujudnya data yang baik.	Analisis utama dengan menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan strategi	Perkembangan zaman membuat Dinas Pendidikan semakin berinovasi untuk memberikan pelayanan yang baik. Salah satu hal yang dituntut masyarakat di era modern ini adalah transparansi. Salah satu unsur penting dalam transparansi adalah kemudahan mengakses informasi.	Perbedaan Jurnal di atas dengan penelitian ini yaitu, pertama, pendekatan keilmuan. Jurnal di atas menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan strategi sedangkan penelitian ini menggunakan kajian ilmu politik yang menganalisa peran dan relasi pemerintah, masyarakat dan komunitas
2	Penelitian dengan judul: "*Mining and quality of public services: The role of local governance and decentraliza*	Tujuan Penelitian ini yaitu untuk membahas efek lokal pertambangan pada kualitas layanan publik dan optimisme masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode untuk menggambarkan efek interaksi untuk individu dengan penilaian kinerja pemerintah	Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang lebih tinggi terdapat sampai batas tertentu, mengurangi efek lokal yang merugikan dari	pertama, pendekatan keilmuan. Jurnal di atas menggunakan metode untuk menggambarkan efek interaksi untuk individu dengan penilaian kinerja pemerintah dalam

	tion" oleh Maty Konte dan Rose Camille Vincent Barnard College, Columbia University, United States UNU-MERIT, Maastricht University, the Netherlands, CERDI-CNRS, Université Clermont-Auvergne, France tahun 2021 12	tentang kondisi kehidupan dan masa depan masyarakat di Afrika tentang hak perpajakan pemerintah. Menggunakan strategi perbedaan-dalam-perbedaan 5	dalam meningkatkan taraf hidup dan pelayanan publik	sumber daya pada hasil sosial-ekonomi. Namun, ini positif peran moderat desentralisasi sangat berkurang dalam adanya korupsi	meningkatkan taraf hidup dan pelayanan publik. dengan melakukannya dengan mengikuti metode yang ada. Kedua, fokus penelitian, jurnal di atas fokus penelitian wilayah pertambangan di dalam 50 kilometer tambang aktif yang memiliki kompleksitas sosial-politik dan tingginya praktek suap, yang jelas berbeda jika dibandingkan dengan penelitian ini yang mengambil objek penelitian di skala lingkup dinas pendidikan dalam memperhatikan peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.
3	Penelitian dengan judul: "Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota	Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada berdasarkan data dan informasi yang diperoleh	Hasil dari Penelitian ini bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* mempunyai hubungan yang tinggi dan signifikan pada taraf kepercayaan dengan kinerja pelayanan publik pada BPN	Perbedaan Jurnal di atas dengan penelitian ini yaitu, Perbedaan Jurnal di atas dengan penelitian ini yaitu, pertama, pendekatan kuantitatif korelasional dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

	Ambon" yang di tulis oleh Aty Uar Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Darussalam Ambon, Jalan Waehakila Puncak Wara Ambon. tahun 2016			Kota Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan kinerja pelayanan publik Kota Ambon teruji kebenarannya.	Kedua, fokus penelitian. jurnal di atas fokus penelitian pada Badan Pertahanan Kota Ambon yang memiliki adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas atau ketanggapan dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap sejumlah indikator kinerja pelayanan publik di Kota Ambon yang jelas berbeda jika dibandingkan dengan penelitian ini yang mengambil objek penelitian di skala lingkup dinas pendidikan dalam memperhatikan peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

2.2 Kajian Konsep dan Teori

Istilah "*government*" dan "*governance*" seringkali dianggap mempunyai kesamaan arti yaitu cara menerapkan otoritas dalam organisasi, lembaga atau negara. Definisi dari *government* atau pemerintah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan pada suat negara. Sedangkan *governance* sendiri seringkali diartikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan (World Bank, 1989). Berikutnya definisi yang paling umum

adalah kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu *Good Governance* didefinisikan juga sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah mengalokasikan dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a).

World Bank (1992a) mendefinisikan *governance* sebagai *"exercise of political power to manage nation*", dimana legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, penyelenggara negara (pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus dan peran negara tidak lagi bersifat regulator, tetapi hanya sebatas fasilitator. Oleh karena itu, legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi *Good Governance* versi World Bank ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan pelaku non-negara yang seluas-luasnya dan melimitasi keterlibatan negara atau pemerintah.

Good Governance merupakan salah satu "pemaksaan" yang dilakukan oleh negara industri maju dan agen internasional dalam membentuk tata kepemerintahan pasar. Dengan melihat kasus Afrika, menunjukkan bahwa pemerintah dianggap sebagai adalah salah satu sumber kegagalan pembangunan. Oleh karena itu, untuk membangun kepemerintahan yang baik maka peran pemerintah harus dikurangi (*less government*) karena diduga pemerintahan yang besar (*big government*) akan menjadi sumber dari kepemerintahan

yang buruk (*bad governance*). Kepemerintahan yang buruk tersebut ditandai dengan pemerintahan yang tidak representatif serta sistem non- pasar yang tidak efisien, dimana dalam prakteknya menjadi sumber kegagalan pembangunan di Afrika. Sejak saat itulah awal mula gelombang dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di dunia ketiga dilakukan, dengan cara mewajibkan sejumlah persyaratan-persyaratan dari World Bank.

2.2.1 Teori A *Good Governance* Sebagai Ideologi Pasar

Governance sering diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan (World Bank, 1989). Selain itu, konsep *governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti perusahaan, internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal.

World Bank (1992) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ada beberapa prinsip yang mendasari pentingnya pemahaman *Good Governance*. Prinsip- prinsip tersebut yaitu:a)Partisipasi masyarakat; b) Tegaknya supremasi; c) Transparasi; d)Peduli dan stakeholder; e)Berorientas pada konsensus; f) Kesetaraan; g) Efektifitas dan efisiensi; h) Akuntabilitas; dan i) Visi Strategis

Good Governance sesungguhnya muncul dalam konteks globalisasi, khususnya setelah runtuhnya komunisme setelah perang dingin dinyatakan selesai, secara sistematik telah didesain untuk merespon berbagai masalah korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai permasalahan di negara-negara miskin dan berkembang. World Bank sebagai lembaga yang pertama kali telah memperkenalkan konsep *"public sector management programs"* dalam rangka melaksanakan tata kepemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam konteks persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan *Structural Adjustment* (World Bank,1989). Dan selanjutnya, *Good Governance* dalam konteks tersebut dipandang sebagai *a sound of development*.

2.2.1.1 ***Good Corporate Governance (GCG) dan Codes Of Governance***

*Good Corporate Governance (GCG) m*enurut Komite Cadburry adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Dan tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Selain itu, pihak ADB (*Asian Development Bank*) (2000) menjelaskan GCG mengandung 4(empat) nilai utama yaitu: *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*. Pengertian lain datang dari *Finance Committee on Corporate Governance of Malaysia* dimana GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk

mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan dari para *stakeholder* lainnya. Berikut adalah prinsip yang terkandung dalam yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility*(pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Fairness*(kesetaraan dan kewajaran), yaitu adanya perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing- masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya yang bertugas dalam menciptakan peraturan perundang-undangan guna menunjang iklim usaha yang sehat,

efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang- undangan dan penegakan hukum secara konsisten *(consistent law enforcement)*

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggung jawab.

Menurut Aguilera dan Cuervo-Cazurra 2004, terdapat dua tujuan utama dibentuknya kode kepemerintahan (*codes of governance)* adalah: (1) meningkatkan kualitas tata kelola pengurus perusahaan dan (2) meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Kode kepemerintahan (*codes of governance*) muncul sebagai respon terhadap adanya *mismanagement* dalam suatu perusahaan. Pada tahun 1999, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengeluarkan Prinsip *Corporate Governance*, dimana sejak diadopsi secara luas sebagai tolak ukur, baik di negara-negara OECD dan negara-negara lainnya. Dalam hal ini, pelaku yang terlibat dalam mengeluarkan kode pemerintahan dibagi dalam empat kelompok besar yaitu : (a)pembuat aturan (*lawmakers)*; (b) Pembuat model (*model makers)*; (c)pembuat pasar (*market makers*) dan; (d)pemegang peran dalam kepemerintahan (*governance enactors*).

2.2.2 Teori B: *Good Governance* sebagai Praktik Tata Kelola Pemerintahan

Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Dengan kata lain *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan *Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

2.2.2.1 **Ciri-ciri *Good Governance***

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang memiliki arti bahwa proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

2.2.2.2 **Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Saat ini *Good Governance* sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *Good Governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi

para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi *(Participation)*

Menurut Dede Rosyada dkk (2000) menyatakan bahwa partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi adanya keterbukaan arus informasi saat ini dapat membawa pengaruh terhadap anak-anak jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan hukum (*Rule of Low*)

Pelaksanaan *good govrnance* tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan dant sanksinya digunakan untuk meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin .

3. Transparansi(*Transparency*)

Kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, disebabkan oleh manajemen yang kurang transparan. Termasuk melakukan transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif(*Responsiveness*)

Salah satu cita-cita dari *Good Governance* adalah responsif, yaitu supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, sehingga jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa berbagai kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan bersama.

5. Konsensus

Aspek fundamental dari tercapainya *Good Governance* adalah perhatian supervisor dalam *Consensus Orientation*. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengambil keputusan secara konsensus, dimana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga

dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf didalam perilakunya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Dalam proses pengelolaan sebagai supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang merasa teraniaya dan tida memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan efisien

Efektifitas adalah berdaya guna dan efisien adalah berhasil guna, dimana efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas memiliki arti pertanggung jawaban supervisor terhadap stafnya, sebab supervisor diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan yang ada dalam lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi merupakan semua pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan, sehingga diperlukan berbagai strategi guna dapat mengatasi perubahan yang akan terjadi di masa depan.

2.2.2.3 **Landasan/Karakteristik *Good Governance***

Konsep *governance* menjadi isu yang sangat sentral dan memiliki karakteristik, setidaknya bila merujuk pada apa yang diidentifikasi oleh Seppo Tiihonen[4] yaitu *governance* sebagai konteks perubahan bentuk rezim politik, *governance* dalam konteks reformasi manajemen publik, *governance* sebagai bagian dari arus neo-liberalisasi dan kapitalisme yang dimulai tahun 1980-an, *governance* sebagai diskursus neo-institusionalisasi ekonomi atau pengembangan ekonomi di berbagai berbasis pasar, dan *governance* sebagai bentuk kebijakan-kebijakan politik.

[4] Seppo Tihonen. 2004. From Governing to Governance. Tampere: Tampere University Press

Dari beberapa sumber organisasi dunia seperti UNDP dan UNESCAP berikut karakteristik *Good Governance* menurut UNDP dan UNECSAP[5] sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.1

Gambar 2.1: Karakteristik *Good Governance*

Dan dalam penelitian yang dilakukan ini hanya akan fokus membahas pada 3(tiga) karakterisitk saja yaitu:

1) Transparansi

Transparansi yang dimaksud disani adalah adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan telah tersedia, serta mudah diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Dengan catatan bahwa keputusan dalam informasi terkait adalah keputusan yang diambil telah mempertimbangkan aturan dan hukum yang berlaku. Informasi cukup disediakan dengan format atau bahkan media yang mudah dimengerti.

[5] Unescap.org

2) **Daya Tanggap**

Yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders dalam kurun waktu yang wajar tentunya.

3) **Akuntabilitas**

Kunci utama *Good Governance* yang baik adalah akuntabilitas. Tidak hanya sektor pemerintah namun juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan institusional lembaga terkait, yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil oleh organisasi atau institusi internal maupun eksternal. Dan pada umumnya organisasi atau institusi bertanggung jawab pada mereka yang akan dipengaruhi oleh kebijakan atau tindakan yang diambil oleh organisasi atau institusi tersebut. Sedangkan akuntabilitas tidak akan pernah luput dan berhasil tanpa transparansi dan aturan hukum.

Determinasi demokrasi dan kapitalisme secara mengglobal berdampak pada perubahan rezim politik sebuah negara. Implikasinya pada perubahan dinamika sosial-politik warga dan pemerintah, relasi antara aktor-aktor politik, dan praktik-praktik bernegara. Perubahan rezim politik pada prinsip-prinsip demokrasi dan globalisasi ekonomi memberi konsekuensi keterbukaan dan kebebasan setiap individu di dalam sebuah negara untuk terlibat dan memiliki peran-peran tertentu.

Untuk mendukung kontekstualisasi perubahan rezim tersebut maka harus melakukan reformasi manajemen publik. Orientasi pada pelayanan masyarakat, membuka ruang partisipasi publik, mengedepankan sistem bottom-up, Maka segala kebijakan politik harus berbasis pada prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi dan supremasi hukum.

2.3 Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehingga pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan aturan yang ada, agar kepuasan masyarakat tercapai. Pelayanan memiliki arti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan melayani kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Tjiptono (dalam Khaerul Umam:2012) berpendapat bahwa pelayanan merupakan bentuk penyajian, tindakan dan informasi yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan pelanggan/pengguna jasa dalam mewujudkan nilai potensial yang terkandung dalam produk/jasa inti yang dibeli pelanggan/pengguna.[6] Sedangkan Sampara (dalam LP Sinambela:2006) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.[7] Oleh sebab itu, pelayanan

[6] Khaerul Umam. 2012. Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia. h. 379
[7] 6 LijanPoltak Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara. h. 5

pasti akan oleh sebab itu selalu berkaitan dengan publik atau masyarakat, sebagaimana Sinambela (2006) menyatakan bahwa, pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk fisik.[8]

Umam dalam Sudarmayanti (2009) menyatakan bahwa pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah, yaitu memberikan pelayanan.[9] Menurut Thoha, pelayanan publik merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Johanna Speer menyatakan:

"The most frequently cited reasons for promoting the implementation of participatory governance mechanisms in developing countries are that it improves public service delivery, that it empowers citizens and that it deepens democracy. More specifically, participatory governance is stated to increase local government responsiveness and accountability. Thus, it is claimed to improve the efficiency and sustainability of public service delivery, as well as the match between public services and beneficiaries' preferences"[10]

---

[8] Ibid
[9] Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung
[10] JOHANNA SPEER *
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Bonn, Germany

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan.

2.3.1 Definisi Manajemen Publik

Menurut Budi Supriyanto (2009), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.[11] Sedangkan, Suryadinata (1996) memandang manajemen pemerintah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan.[12] Taliziduhu Ndraha (1989)

---

[11] Budi Supriyanto. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis).
[12] Suryadinata Ermaya. 1996. Sistem Informasi Manajemen danProses Pengambilan Keputusan. Bandung: CV. Ramdan

mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruan lingkup materi pokok kurikulernya.[13]

1. Asas dan sistem pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan.
3. Ekologi Pemerintahan.
4. Filsafat dan Etika Pemerintahan.
5. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.

Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.

2.3.2 Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan disebut juga manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan

[13] Taliziduhu draha. 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi dilndonesia. Jakarta: Bina Aksara

orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Menurut Untoro dan Halim,[14] dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen strategis sektor publik, maka diharapkan sektor publik dapat:

a. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
b. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (*managing for result*)
c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
d. Menjadikan instansi adaftif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan
e. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan)

Selanjutnya menurut Untoro dan Halim, tujuan manajemen strategi adalah:

a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.

[14] http://www.bintan-s.web.id/2020/11/manajemen-pemerintahan.html

b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.

c. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.

d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.

e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Kendala dalam melaksanakan manajemen strategis sektor publik di sektor publik, terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta, sebagaimana yang disebutkan di atas. Kendala tersebut didefinisikan sebagai kondisi tetap (struktural atau prosedural) yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi dan manajemen harus beradaptasi dan mengatasi masalah atas kendala tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil.

Dalam penelitian ini, untuk mengolah dan menyajikan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dimana prosedur penelitian bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan menyimpulkan proses penguatan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen pemerintahan Dinas Pendidikan di kabupaten Pulau Morotai. Dengan teknik pengumpulan berupa 1) Wawancara ; 2) Observasi; 3) Dokumentasi; dan 4) *Focus Group Discussion*

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan Penelitian adalah bulan Mei – September 2021 yang dilakukan di Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan kabupaten Pulau Morotai.

3.3 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini untuk menganalisa dan menemukan model relasi antara warga/komunitas dengan pemerintah dalam upaya penguatan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen pemerintahan dinas pendidikan. Yang bertujuan mencapai efektifitas dalam pelayanan publik.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong[15] sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

3.4.1 Sumber data Primer

Sumber data primer penelitian ini berasal dari pengamatan secara langsung aktivitas sosial-politik di Pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai. Kedua, melalui wawancara kepada Kepala Dinas dan lembaga-lembaga pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai.

[15] Lexy, J. Moleong, 2006; Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah studi dokumen dan media massa baik itu cetak maupun online.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1) Wawancara ; 2) Observasi; 3) Dokumentasi dan 4) Diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.

1. Observasi

Pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai, terkait dinamika tata kelola Pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap dinamika media cetak dan sosial media yang membahas Pemerintah Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut. Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara[16], yakni: 1) Wawancara mendalam (*in-deptha interview*), dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali; 2) Wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berikutnya peneliti menentukan narasumber (informan) dengan metode *purposive* sampling yaitu Kepala Dinas dan pejabat berwenang lainnya.

[16] M. Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

3. Studi Pustaka

Peneliti menggunakan studi pustaka sebagai tambahan data sekaligus perbandingan referensi saat melakukan pengamatan dan wawancara. Berbagai dokumentasi tertulis seperti undang-undang, peraturan menteri, kepala daerah, nota kesepahaman, sampai literasi dari jejaring internet (daring) yaitu sosial media dan website resmi menjadi rujukan informasi data ilmiah penelitian ini.

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai adalah SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Karena itu dukungan seluruh sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai. Disamping itu, kemampuan manajerial pemimpin dalam menggerakan orang lain guna mencapai tujuan organisasi, juga memberikan kontribusi yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diberlakukannya PP 18/2016 tersebut, maka terjadi perampingan organisasi atau pengurangan jabatan atau eselon pada berbagai bidang atau pelaksana teknis. Namun dengan perampingan itu, tugas-tugas kedinasan yang telah diberlakukan

sebelumnya masih tetap dapat dilaksanakan, yang diharapkan dapat membuat kinerja dalama organisasi semakin lebih efektif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Nomor 2233 Tahun 2016 Kabupaten Pulau Morotai, Dinas Pendidikan memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a) melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan
b) melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan
c) melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas dibidang pendidikan
d) melaksanakan administrasi dibidang pendidikan
e) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
f) melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan;
g) Menetapkan program kegiatan Dinas Pendidikan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

h) Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LPPD, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) serta analisis jabatan (Anjab) pada Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

i) Menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP), Standard Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pendidikan

j) Menetapkan laporan keuangan periode bulanan, triwulan, semester dan tahunan secara berkala

k) Menetapkan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan

l) Melakukan pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan

m) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan

n) Mendorong penguatan ekosistem pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan menyusun rencana kerja dan program kerja Dinas Pendidikan

o) Melaksanakan pendidikan berbasis karakter dan pengintegrasian Imtaq dan Iptek di dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan

p) Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan

q) Mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan, sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal

r) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelibatan publik di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal

s) Menetapkan sistem data dan informasi pendidikan, aturan perilaku dan kode etik organisasi, sistem manajemen kinerja, pedoman penilaian risiko

t) pengendalian aset, indikator kinerja, dan sistem supervisi di lingkungan dinas pendidikan

u) Membina pengelolaan laporan capaian kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, laporan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas pendidikan

v) Menegakkan integritas dan nilai etika, aturan perilaku atau kode etik organisasi di lingkungan dinas pendidikan

w) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pendidikan

x) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia

y) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan

z) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan dan Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducare, berarti "menuntun, mengarahkan, atau memimpin" dan awalan e, berarti "keluar". Jadi, pendidikan berarti kegiatan "menuntun ke luar". Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Dan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

4.2 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kab. Pulau Morotai bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999 serta perubahan lingkungan strategis yang cepat, maka ada dua tantangan yang akan

dihadapi Kabupaten Pulau Morotai ke depan: pertama, kompetisi sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas dunia, dan kedua adalah upaya membangun kerjasama antar lembaga yang sinerjik dan saling menguntungkan untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai. Dengan adanya tantangan ini diharapkan Kabupaten Pulaua Morotai mampu memanfaatkan peluang dan potensinya untuk memainkan peranan dan kontribusi lebih besar bagi kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Pembangunan pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam menyukseskan pencapaian tiga misi pembangunan Nasional tersebut, terutama untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global di era perekonomian berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Economy*) yang semakin ketat dengan persaingan. Untuk itu, setiap warga negara diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas serta berdaya saing SDM.

Gambar 4.1 Kunjungan Wawancara Kepada Bapak Kepala Dinas Pulau Morotai Fornichly Revi Dara, S. Pd, M. Pd
(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2022)

Bapak Kepala Dinas Fornichly Revi Dara, S. Pd, M. Pd menyampaikan dalam wawancara pada 12 Juni 2022

> "Dinas pendidikan bersama pihak sekolah melakukan pendekatan dengan Camat, kepala Desa, Masjid, Gereja kita selalu koordinasi tentang pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang kegiatan program pemerintah untuk tujuan memahami proses pelayanan kepada masyarakat terkait pendidikan dengan program sekolah unggulan."

Sekolah unggulan adalah salah satu prestasi yang membanggakan karena program pemerintah sudah berjalan yaitu sekolah gratis dan membuat kualitas sekolah baik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sudah menunjukkan prestasi yang baik dan menjadi kepercayaan oleh masyarakat dalam mensekolahkan putra dan putrinya, itu sudah menunjukkan pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai.

4.3 Tugas Pokok & Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai

Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan
2. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah;
5. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga pendidikan
7. Penyelenggaraan tata usaha Dinas;
8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
9. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

4.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pulau Morotai. Ditetapkan bahwa Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai adalah menyelenggarakan Urusan Bidang Pendidikan dan Menyelenggarakan Urusan Bidang Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

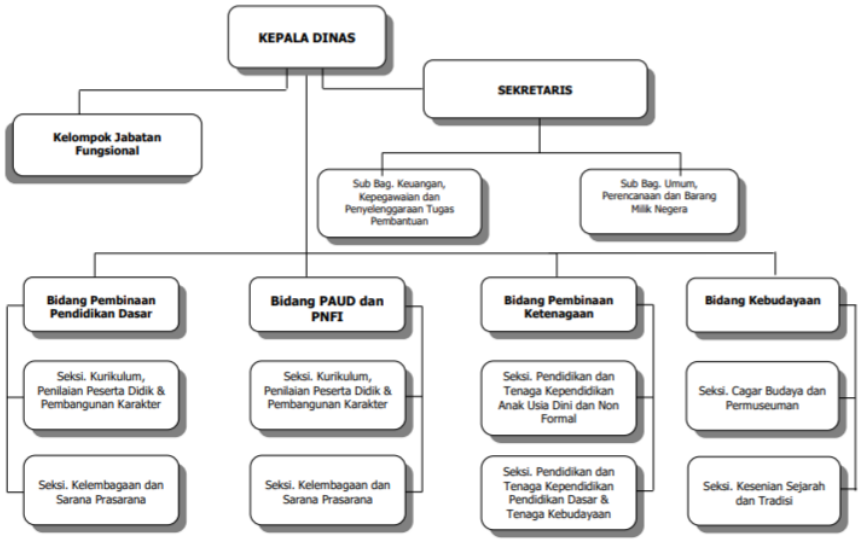

Gambar 4.2 Struktur Organisasi
(Sumber: Data Primer Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai 2021)

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas, membawahi:
    a. Sub Bagian, Keuangan, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
    b. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Barang Milik Negara;

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, membawahi:
    a. Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
    b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
    a. Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
    b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
5. Bidang Kebudayaan membawahi:
    a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; Renstra;
    b. Seksi Kesenian, Sejarah dan Tradisi;
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
    a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Tenaga Kebudayaan;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.5 Informan dan Narasumber Penelitian

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun kebijakan teknis dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Kebudayaan dan Bidang Ketenagaan;

b. Merumuskan rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan visi misi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagai acuan kerja;

c. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

d. Membimbing dan mengarahkan Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Membina pelaksanaan pengawasandi Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Kebudayaan dan Bidang Ketenagaan;

f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan Renstra

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan membawahi:

1) Sekretariat;

2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;

3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;

4) Bidang Kebudayaan; dan

5) Bidang Pembinaan Ketenagaan.

2. Kasubag Keuangan, Kepegawain dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Penyelenggaraan.

Tugas Pembantuan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas di bidang Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran dan Tugas Pembantuan;

b. Pengelolaan data dan informasi;

c. Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal, kebudayaan dan Tugas Pembantuan;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran dan Tugas Pembantuan;

e. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik; dan

f. Penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

3. Kasubag Umum, Perencanaan dan Barang Milik Negara Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Barang Milik Negara di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris di bagian Umum, Perencanaan dan Barang Milik Negara. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal dan kebudayaan;

b. Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal dan kebudayaan;

c. Urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non-formal;

4. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pembangunan Karakter Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta didik dan Pembangunan karakter di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta didik dan Pembangunan karakter menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;

b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Non-formal;

c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kurikulum penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal; dan

e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal.

4.6 Indikator Kinerja SKPD Kabupaten Pulau Morotai

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai, adalah sebagai salah satu mata rantai yang tidak terlepas dari 5 dokumen perencanaan yaitu RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja. Mengingat pentingnya Renstra sebagai rujukan untuk menyusun program kerja SKPD untuk perencanaan yang terarah, terpadu, dan tepat sasaran. Disamping itu salah satu kunci sukses melaksanakan visi dan misi organisasi dengan menyiapkan pengukuran kinerja yang mencakup:

1. Penyusunan Rencana Strategi SKPD
2. Pengukuran Kinerja/Penetapan indicator
3. Implementasi dan
4. Evaluasi kinerja

Pengukuran kinerja sebagai suatu proses pencatatan dan pengukuran pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian tujuan sesuai visi dan misi, dengan menggunakan komponen sebagai berikut:

1. Penetapan indikator kinerja
2. Pencapaian kinerja, dan
3. Evaluasi kinerja

Penetapan indikator antara lain : masukan (input) yakni yang berkaitan dengan sumber daya manusia, material/sumber daya alam, bahan baku, waktu, teknologi, dan sebagainya; Keluaran (output) produk/jasa (fisik/non fisik) sebagai

hasil langsung dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan masukan yang diberikan; Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang terkait dengan fungsi keluaran yang bisa memenuhi harapan masyarakat; dan Manfaat (benefit) adalah kegunaan dari suatu keluaran yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat (tersedia fasilitas dapat dirasakan yang dapat diakses oleh masyarakat); serta dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan dan kepentingan umum. Seiring dengan perubahan dinamika khususnya di dunia pendidikan memberikan suasana perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sangat cepat serta tuntutan proses transparansi, setiap awal tahun selayaknya dilakukan evaluasi terhadap sinergitas antara Renstra dan Renja serta implementasinya guna dapat mengetahui indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, sehingga langkah kedepan tetap fokus, terarah, dan tepat sasaran rencana kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.

Kaitannya dengan evaluasi kinerja, juga ada satu alur yang dilakukan untuk menganalisis pencapaian akuntabilitas sebagai kewajiban dari masing-masing SKPD untuk mempertanggunjawabkan keberhasilan maupun kegagalan visi dan misi sesuai periodesasi merupakan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang AKIP dan LAKIP. Dengan demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Penyelenggaraan Good Governance program sekolah Unggulan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai

Menurut Asian Development Bank, (2000) dalam penerapan GCG (good corporate governance) perlu di dukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara, Dunia usaha dan masyarakat. Dalam program sekolah unggulan di Kabupaten Pulau Morotai, hubungan yang dibangun oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan, masyarakat yang diwakili oleh wali murid dan guru, dunia usaha diwakili oleh Sekolah dan pengusaha.

Hubungan yang terbangun dalam penyelenggarana good governance program sekolah unggulan ini adalah: Hubungan Negara dengan Masyarakat, Hubungan Negara dengan dunia usaha, Hubungan dunia usaha dengan masyarakat. Dimana dalam hubungan yang dibangun terdapat 3(tiga) aspek yang menonjol dari 9(sembilan) aspek yang disimpulkan dalam hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) yaitu: aspek partisipasi, aspek akuntabilitas dan aspek transparansi.

5.1.1 Hubungan Negara dengan Masyarakat

Partisipasi dari orang tua terhadap anak-anak selama menempuh pendidikan dan kesadaran guru dalam mendidik siswa disekolah unggul sanngatlah dibutuhkan. Oleh karena itu agar partisipasi yang diharapkan dapat berjalan dengan baik, maka kebijakan tentang sekolah unggulan ini diawali dengan membangun dialog publik melalui sarana pertemuan rutin dengan masyarakat. Dimana dari hasil wawancara

dengan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Bapak F Revi Dara, M.Pd menyampaikan bahwa

> "membangun *good governance* diawali dengan diskusi-diskusi dengan masyarakat, membangun keterbukaan dengan media sosial dengan pendekatan langsung seperti kunjungan ke sekolah terpencil dan keliling di setiap kecamatan sambil bertanya dengan masyarakat. Kuncinya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, memberi kesempatan bertanya dan berpendapat."

Hal tersebut dilakukan juga dipergunakan sebagai upaya dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam program sekolah unggulan ini melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui media sosial, group Whatsapp, seminar di sekolah dengan kepala sekolah dan guru-guru.

5.1.2 Hubungan Negara dengan dunia usaha

Dunia usaha merupakan salah satu pilar yang mendorong terwujudnya good governance daalam penyelenggaraan program sekolah unggulan di Kabupaten Pulau Morotai. Dimana dalam penelitian ini diwakili oleh sekolah dan pengusaha penunjang sarana dan prasarana. Agar akuntabilitas dalam program sekolah unggulan dapat di implementasikan, maka Dinas pendidikan Kabupaten Pulau Morotai meminta laporan kinerja proses pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah unggul. Dan berikutnya untuk menginformasikan hasil kinerja dari sekolah

kepada masyarakat merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan sebagai bentuk transparansi informasi.

Selain itu, pihak pengusaha terutama yang bergerak dibidang IT juga diminta turut serta dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya program sekolah unggulan ini. Dimana dalam proses penyediaan fasilitas dan infratruktur dilakukan dengan cara melalui lelang. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sehingga produk yang diberikan oleh para pengusaha merupakan produk IT terbaik sesuai dengan kebutuhan.

5.1.3 Hubungan dunia usaha dengan masyarakat

Dengan adanya transparansi informasi yang dilakukan maka antara dunia usaha dan masyarakat juga terjalin hubungan yang baik, dimana masyarakat juga dapat saling berkolaborasi dan berkomunikasi. Antara sekolah dengan orang tua siswa dapat saling berdiskusi atau bertukar pikiran terkait dengan perkembangan sistem pembelajaran dan fasilitas yang digunakan.

Hal ini sangat baik dilakukan karena adanya model relasi seperti ini, masyarakat dapat menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggung jawab.

5.2 Prinsip Efektifitas dan Efisiensi yang diterapkan dalam manajemen program sekolah unggulan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai

Karakteristik manajemen sekolah tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika manajemen merupakan wadah/kerangka, maka

sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik manajemen sekolah berikut memuat secara inklusif elemen-elemen sekolaha fektif, yang dikategorikan menjadi input, proses dan output. Dalam menguraikan karakteristik manajemen sekolah, pendekatan sistem yaitu input-proses dan output digunakan untuk memandunya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik manajemen sekolah (yang juga karakteristik sekolah efektif) mendasarkan kepada input, proses, dan output. Selanjutnya, uraian berikut dimulai dari output dan diakhiri input, mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, sedangkan proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output, dan input memiliki tingkat lebih rendah dari output.

Output yang diharapkan, Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik (*academic, achivement*) dan output berupa prestasi non-akademik (non-academic achivement). Output prestasi akademi misanya, NEM, lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berfikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktf, dan ilmiah). Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedipsiplinan, kerajinan prestasi olah raga, kesenian, dan kepramukaan. b) Proses Sekolah yang efektif

pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut:

1) Proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi;
2) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat;
3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif;
5) Sekolah memiliki budaya mutu;
6) Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis;
7) Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian);
8) Partisipasi yang tinggi dari warga masyarakat;
9) Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen;
10) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah;
11) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;
12) Memiliki komunikasi yang baik;
13) Sekolah memiliki akuntabilitas Input Pendidikan:
    a) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas;
    b) Sumber daya tersedia dan siap;
    c) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi;
    d) Memiliki harapan prestasi yang tinggi;

e) Fokus pada pelanggan (khususnya siswa);

f) Input manajemen.

Ciri-ciri manajemen sekolah, antara lain: a) Upaya meningkatkan peran serta Komite Sekolah dan masyarakat untuk mendukung kinerja sekolah; b)Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar (kurikulum), bukan kepentingan administratif saja; c)Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil dan fasilitas); d)Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan; e)Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat; f)Meningkatkan profesionalisme personil sekolah; g)Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang; h)Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah (misal:Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat,dll); i)Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah.

Pendekatan untuk mengukur sejauh mana kinerja pegawai secara individual ada enam kriteria, yaitu[17] Efektifitas Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas kerja persepsi pegawai dalam menilai pemanfaatan waktu dalam menjalankan

[17] Bernardin, dalam Robbins, 1996:260

tugas, efektivitas penyelesaian tugas yang dibebankan organisasi. Fungsi dalam tiga elemen mandat tata kelola sekolah yaitu: arahan strategis; bertindak sebagai teman kritis; dan meminta pertanggungjawaban sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan data yang di dapat, dengan melihat atau melakukan observasi secara langsung dan apa yang di sampaikan oleh informan sudah melaksanakan kegiatan pendidikan yang efektif dan efisien, Program sekolah unggulan sudah didukung teknologi bagi siswa dan siswi, para guru juga mendapatkan pendidikan melalui pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kualitas belajar dan mengajar.

5.3 Model Tata Kelola Penerapan *Good Governance* dalam Manajemen Sekolah Unggul pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai

Prinsip *good governance* yang dirumuskan UNDP (the United Development Programme) diantaranya: *participation*; *rule of law*; *transparency*; *responsiveness*; *consensus orientation; equity; effectiveness and efficiency; accountability; dan strategic vision* (Philipus M. Hadjon, h. 5). Menurut Genie Rochman (2000) menyebutkan prinsip *good governance* diantaranya: akuntabilitas, adanya kerangka hukum; informasi; dan transparansi. Serupa dengan hal itu, Bhatta (1997) juga menyebutkan prinsip *good governance* diantaranya: *accountability; transparency; opennes; and rule of law*. Maka, secara umum prinsip yang dimaksud diantaranya: *rule of law* (berdasarkan hukum); *transparancy* (transparansi); *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efesiensi); *accountability* (akuntabilitas); dan *participation* (partisipasi).

Dengan kerangka teori di atas, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa manajemen pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai telah memenuhi persyaratan sebagai model tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu indikatornya adalah, Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bernama Bapak F Revi Dara, M.Pd. telah melaksanakan program Manajemen Sekolah unggulan pada pendidikan dasar yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai no.37 tahun 2009 tentang pelaksanannnya untuk mengoptimalkan penerapan manajemen sekolah unggulan. Dengan memiliki tujuan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas proses pembelajaran dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam pelaksanaan MSU target tujuannya adalah:

a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada
b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama
c) Meningkatkan tanggung jawab sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah
d) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan di capai

Dengan MSU tersebut kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai Bapak F Revi Dara, M.Pd. menyatakan dalam wawancara dengan peneliti pada 12 Juni 2022

> "Pengembangan pada SDM yang apa artinya punya sekolah unggulan namun SDM belum mampu, kita sudah kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan kepada diklat-diklat pendidikan guru agar potensi untuk mengajar, apa lagi sekarang setiap siswa sudah difasilitasi dengan tablet, dan laptop yang bisa di bawa pulang sehingga SDM Guru harus ikut maju dalam pola pendidikan, karena juga terkait akreditasi dan kualitas sekolah yang memang harus unggul dalam skema pendidikan,"

Dinas Pendidikan Pulau Morotai sudah menjalankan MSU dengan memperhatikan seluruh sektor di lingkup pendidikan baik dari SDM Guru, Infrastruktur dan memperhatikan kebutuhan Guru dalam kegiatan belajar dan mengajar sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pendidikan yang unggul dan menjamin kualitas lulusan siswa.

Gambar 5.1 Bapak Kepala Dinas Pendidikan Menerangkan tentang Pentingnya SDM dalam sesi wawancara
(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2022)

dari pernyataan Bapak Kepala Dinas tersebut bahwa MSU sudah dilaksanakan dengan pengawasan dan perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai. Seperti yang di kutip dalam wawancara langsung peneliti "Tujuan pembangunan sekolah unggulan ini, karena kita ingin menciptakan sekolah yang benar-benar berkualitas. Pasalnya, pemda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai akan menyiapkan kepada setiap siswa/I mempersiapkan alat berupa tablet dan laptop yang bisa di bawa pulang" ungkap kadikbud Pulau Morotai, F Revi Dara, kepada peneliti dalam sesi wawancara[18].

Gambar 5.2 Wawancara dengan Bapak Didit Wahyudi sebagai kepala sekolah di sekolah unggulan Kabupaten Pulau Morotai
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2022

[18] https://www.youtube.com/watch?v=o68jBDCyH4Y

Hasil dari sekolah unggulan yang pertama adalah sudah siap dengan sarana dan prasarana bangunan dan pendukung yang diatas level umum dari sekolah non-unggulan di sampaikan oleh Bapak Didit Wahyudi

> "Dengan pembelajaran menggunakan IT antusias siswa dalam belajar sangat tinggi dan siswa-siswi di sekolah unggulan tidak gaptek, ujian pun sudah online dengan menggunakan alat elektronik, selain itu siswa/i juga selalu menunjukkan prestasi-prestasi yang membanggakan yang mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6"

Selain itu sekolah juga memiliki prestasi akademik dan non akademik di bidang oleh raga, olimpiade sains nasional, dan mendapat prestasi juara pertama lomba-lomba tingkat kabupaten karena infrastruktur yang sangat memadai.

Gambar 5.3 Wawancara mengenai Prosedur Tes dalam memasuki sekolah Unggulan[19]

[19] https://www.youtube.com/watch?v=Gba6HGvCy6Y

(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2022)

SD negeri unggulan 1 (satu) melakukan tespotensi akademik dari sekolah TK untuk bisa masuk harus memenuhi standart nilai yang sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten Pulau morotai dalam menentukan nilai bisa masuk Sekolah unggulan, disamping itu Kompetensi guru juga selalu diperhatikan untuk menjaga eksistensi dalam mengajar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan bahwa manajemen pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu tahun 2019-2020. Indikasi itu tampak dari sikap positif pemerintah dan kepercayaan masyarakat pada pendidikan baik dalam program sekolah unggulan. Tata kelola Sekolah Unggulan mendapatkan apresiasi di skala lokal dan mengikutsertakan sebagian besar masyarakat terutama wali murid untuk memiliki jaminan dan kepercayaan untuk menyekolahkan Putra dan Putrinya di sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.

6.1.1 Hubungan Masyarakat dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan *Good Governance*

1. Indikator *Input*

   a. Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai

      Peneliti menarik kesimpulan Bahwa SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dalam penerapan program sekolah unggulan. Indikasi itu terlihat dari hasil observasi dan wawancara bahwa ada relasi antara pemerintah dengan masyarakat setempat dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar dalam program Sekolah Unggulan.

b. Sekolah Unggulan

Sekolah unggulan adalah sekolah gratis dan di fasilitasi alat-alat modern seperti tablet dan laptop untuk program sekolah di era digital, juga di lengkapi dengan sarana dan prasararana sekolah yang mumpuni seperti fasilitas arena olahraga, dan antar jemput siswa berangkat dan pulang sekolah.

2. Indikator *Output*

Terdapat aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam model relasi atau hubungan yang terjalin antara Dinas pendidikan (mewakii negara), Sekolah dan Pengusaha IT (mewakili dunia usaha) dan orang tua siswa (mewakili masyarakat)..

6.1.2 Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Sekolah Unggulan Kabupaten Pulau Morotai

1. Indikator *Input*

- Jalur komunikasi yang tepat sasaran antara pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Pulau Morotai dengan masyarakat, kelompok Agama dan informasi melalui media cetak dan elektronik tentang sekolah unggulan.
- Hasil dari program sekolah unggulan membuat masyarakat merasa program ini sangat membantu pendidikan anak-anak mereka di usia dini baik tingkat SD, SMP dan SMA
-

2. Indikator *Output*

Apa yang telah di programkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai mampu menjadi tolak ukur oleh masyarakat dalam pelayanan pubik, komunikasi, dan kegiatan MSU, yaitu mewujudkan rasa kepercayaan dan harapan kepada Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai

6.1.3 Model Tata Kelola Manajemen sekolah Unggul

1. Indikator Input

Dalam tata kelola sekolah Unggul menerapkan prinsip *rule of law* (berdasarkan hukum); *transparancy* (transparansi); *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efesiensi); *accountability* (akuntabilitas); dan *participation* (partisipasi).

2. Indikator Output

Adanya Peraturan Bupati Pulau Morotai No.37 tahun 2009 tentang pelaksanannnya untuk mengoptimalkan penerapan manajemen sekolah unggulan yang memiliki tujuan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas proses pembelajaran dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai diharapkan dapat lebih mempertegas peraturan-peraturan yang berlaku karena dengan tegasnya peraturan itu dapat lebih menunjang keaktifan dalam menciptakan pemerintahan yang baik
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai selaku pemimpin tertinggi didalam pemerintahan kedinasan harus lebih memperhatikan program sekolah unggulan dan menambah jumlah dari progran tersebut sehingga pendidikan semakin maju dan menambah kepercayaan masyarakat menjadi semakin tinggi.
3. Mendorong partisipasi dari pengusaha lokal khusus nya yang bergerak dibidang Lembaga Kursus Bahasa Inggris untuk dapat memberikan kursus gratis pada guru-guru pada sekolah unggulan yang mengarah SBI.
4. Mendorong partisipasi dari para pengusaha komputer untuk memberikan pelatihan IT secara gratis untuk anak-anak SD/SMP pada sekolah unggulan.
5. Penelitian ini memerlukan tindak lanjut terutama dalam menguji konsistensi penerapan *good governance* di masa mendatang dalam pergantian masa jabatan periodik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Selain itu, masih begitu banyak hal-hal menarik lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini untuk kemudian di telaah lebih mendalam seperti peranan bidang

kebudayaan dan pariwisata, untuk memberikan kepercayaan dan korporasi dan warga masyarakat secara khusus dan mendalam.

Daftar Pustaka

Amelia,dkk. (2013). Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru. Hal 1-15.

Aprianto. (2010). Efektifitas Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pada Pendidikan Vokasional. Thesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Arief Rahman. (2015). Guru, (Jakarta: Esensi), hlm. 146-147. Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018. No. 92/11/Th. XXI, 05 November 2018.

Bafadal, Ibrahim. (2003), Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara

Bourne, et. al. (2005*). Managing through measures: A study of impact on performance. Journal of Manufacturing Technology Management, 16(4), 373-395*.

Chai N. (2009). *Sustainability Performance Evaluation System in Government. A Balanced Scorecard Approach Towards Sustainable Development. Springer, London. CUI-ITB. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol.15. No. 1. 2004. Hal 34-47.

Daft, R. L. (1991). Management (2nd ed.). New York: Rinehart and Winston, Inc.

Darmi & Titi. (2016). Penerapan Prinsip *Good Governance* Untuk Layanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 4, Nomor 2. hlm. 87-156.

Darmi. (2016). *Good Governance Implementing into Social Assistance Management Known as (Bansos) in International Conference on Public Management. International press*

Dayanandan. (2013). *Good Governance Practice for Better Performance of Community Organizations - Myths and Realities*. *Journal of Power, Politics & Governance*, Vol. 1 No. 1 Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Ekundayo. (2017). *Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria*. *International Journal of Humanities and Social Science*, Volume 7 No. 5

Erkkila, Tero. (2007). *Governance and Accountability- A shift in conceptualization*. *University of Helsinki*. *Jurnal PAQ SPRING.Pp 1-38.pdf European Commission. (2018). European ideas for better learning: the governance of school education systems*. *Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture Schools and multilingualism*.

Evans, Martin G. (1970). "*The effects of supervisory behavior on the path-goal relationship*". *Organizational Behavior and Human Performance* Vol.5: 277–298.

Hayden, Goran & Julius Court. 2002. *Governance and Development: World Government Survey, Discussion Paper 1*. *New York: United Nation University*.

Hidayat, A.A. (2014). Metode penelitian keperawatan dan teknis analisis data. Jakarta: Salemba Medika Hudson, M., Smart, A. and Bourne, M. (2001). Theory and practice in SME performance measurement systems. International Journal of Operations & Production Management, 21(8), 1096-1115.

Husaini Usman. (2010). Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Indonesia Governance Index (IGI). (2013). *Towards A WellInformed Society and Responsive Government*. *Executive Report Indonesia Governance Index 2012*. *The Partnership for Governance Reform*.

Istianto, Bambang, 2011. Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif layanan Publik), Jakarta: Mitra Wacana Media.

J. Moleong, Lexy. 2006; Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya Keraf, Sonny. 2002. Etika Lingkungan, Jakarta: Buku Kompas.

Jafriansen Damanik. (2015). Upaya Dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. STKIP Purnama Jakarta.

Kusmayadi, D., Rusdiana, D., & Badruzaman, J. (2015). Pemodelan Tata Kelola Sekolah Yang Baik Pasca Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Tasikmalaya. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 5(1).

Lalolo Krina P, Loina, 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Laforet S. (2011). A framework of organisational innovation and outcomes in SMEs, International. Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 17 (4): 380–408. 206

Matei L. (2006). *Management public – edi ția a doua [Public Management – Second Edition]. Economic Publishing House, Bucharest, page 191 – quote*.

Mulyasa, E. (2003). Managemen Berbasis Sekolah. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. (2014). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. PDSK Kemendikbud. (2017). Statistik Persekolahan SMK 2017/2018. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Setjen, Kemendikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Permendiknas No.16 Tahun 2007. tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakart: Departemen Pendidikan Nasional

Prasojo, L.D. (2009). Model Manajemen Sekolah Kejuruan Abad ke-21. Jurnal manajemen Pendidikan, No.2.

Profiroiu M. (2001). Managementul organiza țiilor publice [Management of Public Organizations]. Economic Publishing House, Bucharest.

Rahadian, Achmad Hidayat. (2010). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah STIAMI.Hal 57-70.

Rahayu, A. (2010). Analisis Sumber Daya Sekolah dan Program Penciptaan Nilai dalam Meningkatkan Daya Saing Sekolah. EDUCATIONIST Vol. IV No. 1, ISSN: 1907 – 8838.

Sitepu, J. A. M. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Bulan Terang Utama. Agora, 4(1), 192-198.

Slamet. (2015). Penilaian *Good University Governance* pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sri Minarti. (2012). Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Stoner, James AF, R Edward Freeman, Daniel R Gilbert Jr. (1992). "Management" Sixth Edition. Prentice Hall International Inc., New Jersey

Striteska, M. dan Spickova, M. (2012). *Review and Comparison of Performance Mesaurement Systems. Journal of Organizational Studies Vol.2012 (2012), IBIMA Publishing*.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tangerang: Cv. Media Brilian.

Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana. (2003). Total Quality Management. Yogyakarta: ANDI

.

Trakulmututa, Jutamanee, dan Chaijareonwattana, Bussabong. (2013). *Factors affecting the achievement of good governance in HRM: the empirical study of local goverment in southern part of thailand. International journal of business and social science. 4(7).*

Tuckman, W.B. (1999). *Conducting Eductional Research, Fifth edition. USA: Harcourt Brance & Company. UNDP. (1995). Human Development Report 1995. New York: Oxford University Press*

Thoha, Miftah, 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tihonen. Seppo. 2004. From *Governing to Governance*. Tampere: Tampere University Press.

Usman, Husiani. (2013). Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan-Edisi 4, Jakarta: Bumi Aksara Wibawa, S. (2006). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance* (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Surabaya: Insan Cendekia

Wulandari, Suci. (2009). Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surakarta). STIE IEU Yogyakarta. Jurnal Studi Akuntansi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Hal 60-74.

Jurnal :

*Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services? JOHANNA SPEER * Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Bonn, Germany*

Mining and quality of public services: The role of local governance and decentralization Maty Konte a,b,⇑ , Rose Camille Vincent b,c,a Barnard College, Columbia University, United States bUNU-MERIT, Maastricht University, the Netherlands c CERDI-CNRS, Université Clermont-Auvergne, France

Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon Aty Uar*) Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Darussalam Ambon, Jalan Waehakila Puncak Wara Ambon

Internet

https://dikpora.pulaumorotaikab.go.id/profile/read/3/struktur-organisasi-dinas
https://adoc.pub/profil-daerah-kabupaten-pulau-morotai-tahun-2015.html
https://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=site/index
https://dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id/Blog/Halaman/tugas-pokok-dan-fungsi-dinas-pendidikan
http://www.bintan-s.web.id/2020/11/manajemen-pemerintahan.html
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_a9214df4c0_BAB%20IVBAB%20IV%20PROFIL%20KAB.%20PULAU%20MOROTAI.pdf

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Tonny Laos

ORIGINALITY REPORT

23%	23%	10%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	4%
2	core.ac.uk Internet Source	3%
3	adoc.pub Internet Source	2%
4	erepository.uwks.ac.id Internet Source	2%
5	journal.unismuh.ac.id Internet Source	1%
6	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%
9	dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id Internet Source	1%

10	Maty Konte, Rose Camille Vincent. "Mining and quality of public services: The role of local governance and decentralization", World Development, 2021 Publication	1 %
11	Peraturan.Bpk.Go.Id Internet Source	1 %
12	www.kopertis12.or.id Internet Source	<1 %
13	jdih.paserkab.go.id Internet Source	<1 %
14	dispendik.blitarkab.go.id Internet Source	<1 %
15	lukypurwa.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	Speer, Johanna. "Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services?", World Development, 2012. Publication	<1 %
17	www.sciencedirect.com Internet Source	<1 %
18	abilify14.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	issuu.com Internet Source	

		<1 %
20	embiss.com Internet Source	<1 %
21	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
22	ejournal.karinosseff.org Internet Source	<1 %
23	edoc.pub Internet Source	<1 %
24	www.bintan-s.web.id Internet Source	<1 %
25	dikbud.pangkalpinangkota.go.id Internet Source	<1 %
26	jdih.probolinggokab.go.id Internet Source	<1 %
27	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.sip-ppid.mataramkota.go.id Internet Source	<1 %
29	jdih.pangkalpinangkota.go.id Internet Source	<1 %
30	id.scribd.com Internet Source	<1 %

31	jambikota.go.id Internet Source	<1 %
32	disdik.taputkab.go.id Internet Source	<1 %
33	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.maltengkab.go.id Internet Source	<1 %
36	ppid.pasamankab.go.id Internet Source	<1 %
37	repository.dinamika.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.gurujugan.com Internet Source	<1 %
40	www.hal.inserm.fr Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
42	dikbud.pulaumorotaikab.go.id Internet Source	<1 %

43	dindik.pontianakkota.go.id Internet Source	<1 %
44	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
46	www.scribd.com Internet Source	<1 %
47	acehbesarkab.go.id Internet Source	<1 %
48	docplayer.info Internet Source	<1 %
49	jdih.pekalongankab.go.id Internet Source	<1 %
50	pasca-uncen.ac.id Internet Source	<1 %
51	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
52	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
53	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
54	sumbawabaratkab.go.id Internet Source	<1 %

55	Yosceline Mahino, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung. "ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018 Publication	<1%
56	www.informasiguru.com Internet Source	<1%
57	sumsel.bpk.go.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Tonny Laos

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74